

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BANSOS)
TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN TALIABU
TAHUN 2015-2021**

**MUAMIL SUN'AN
AMRAN HUSEN
MOH. AMRUL BADAL**

ABSTRACT

The aims of this study are: (1) To analyze the impact of the Family Hope Program on poverty levels in Taliabu Regency during 2015-2021. (2) Analyze how the impact of the Cash Assistance Program on the poverty level in Taliabu Regency during 2015-2021. (3) Analyzing how the impact of the Village Fund Cash Assistance Program on the poverty level in Taliabu Regency during 2015-2021. The type of data in this study is secondary data as the main data, while primary data is complementary to secondary data. The source of secondary data is sought to be obtained from the agency that is the source of the data, namely the Taliabu District Social Service, Bappeda, and BPS. The analytical tools used are descriptive statistical analysis, classical assumption test, coefficient of determination test, regression analysis and hypothesis testing. Descriptive statistical analysis, classical assumption test, and coefficient of determination test were assisted by the SPSS version 22 for windows program, while for regression analysis and hypothesis testing by looking at the p-value using the Data Analysis application in the Microsoft Excel program. The result is that the variable of the family hope program partially and simultaneously has a positive and significant effect on the poverty level in Taliabu Island Regency, the social assistance variable has a positive and significant effect on the poverty level in Taliabu Island Regency and the village fund assistance variable has a negative and insignificant effect on the poverty level. in Taliabu Island Regency.

Keywords: Social Assistance, Poverty, Taliabu Island Regency

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama pasal 33 dan 34, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012, Bantuan Sosial (Bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pemberian bansos tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Menurut penelitian pada sebuah negara berpenghasilan rendah yang sedang dalam masa transisi (*a low-middle income country in transition*), bukti bansos dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tidaklah cukup (Habibov & Fan, 2006). Hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut, secara desain program bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, serta skala ekonomi yang sedang dalam masa transisi menyulitkan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat miskin. Lebih lanjut, (Gupta & Abed, 2002), (Rajkumar & Swaroop, 2008), serta (Devarajan & Reinikka, 2004) mengungkapkan salah satu factor keberhasilan belanja pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan adalah dengan tata kelola yang baik.

Meskipun kategori belanja pemerintah lainnya juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu, layanan sosial pada dasarnya dianggap sebagai yang terpenting khususnya untuk meningkatkan potensi penghasilan masyarakat miskin termasuk di Indonesia (Tiongson, Davoodi, & Asawanuchit, 2003). Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan bansos sebagai strategi dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Menurut data Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Nota Keuangan (NK) 2019, jumlah belanja bansos terus meningkat dalam empat tahun terakhir dan meningkat sebesar 28,65 persen pada tahun 2019 dari proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Berdasarkan data BPS, meskipun pemerintah telah meningkatkan jumlah bansos dalam empat tahun terakhir, tingkat pengentasan kemiskinan di Indonesia mengalami perlambatan dan tingkat kesenjangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan (*CRI Index*) tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 90 dari 157 negara serta menempati peringkat 98 dari 157 negara terkait belanja sosial pemerintah. Terlebih lagi, 24 persen penduduk Indonesia hidup di antara garis kemiskinan dan 1,5 kali garis kemiskinan masih sangat rentan untuk kembali jatuh miskin jika mereka mengalami guncangan, seperti terkena penyakit, bencana alam, atau gangguan lainnya terhadap pendapatan dan mata pencaharian sehari-hari mereka (World Bank, 2017).

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian maupun masyarakat rentan miskin. Salah satu perbaikan yang bisa dilakukan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ialah mempercepat penyerapan belanja APBN yang secara spesifik pada anggaran untuk PEN. Program PEN sendiri direalisasikan dalam bentuk program perlindungan sosial dengan menggunakan

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/kartu sembako), Bantuan Sosial Tunai (BST), BST bagi penerima sembako Non PKH, Bansos beras bagi penerima PKH, Kartu Prakerja serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kabupaten Taliabu hinggata tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 56.202.003 jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 7.712 jiwa, tahun 2019 jumlah penduduk miskin sedikit meningkat 7.850 atau naik 1,75% dan di tahun 2020 turun di angka 3.890 jiwa atau menurun 50,44%. Terhadap total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020 sejumlah 1.645 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp.987.000.000.00,.

Rinciannya di Kecamatan Ledo sejumlah 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kecamatan Tabona sejumlah 164 KPM, Kecamatan Taliabu Barat sejumlah 340 KPM, Kecamatan Taliabu Barat Laut sejumlah 197 KPM, Kecamatan Taliabu Selatan sejumlah 224 KPM, Kecamatan Taliabu Timur sejumlah 59 KPM, Kecamatan Timur Selatan sejumlah 165 KPM dan Kecamatan Taliabu Utara sejumlah 381 KPM.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perbaikan dalam mekanisme penyaluran Rastra. Selanjutnya, PKH merupakan jenis bansos yang paling efektif, hal tersebut mengindikasikan diperlukannya kajian yang lebih mendalam mengenai besaran nominal bantuan yang diberikan. Terakhir, PIP merupakan jenis bansos yang paling kecil dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan, oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam baik berupa mekanisme penyaluran maupun besaran bantuan yang diberikan.

Atas permasalahan diatas yang menjadikan alasan peneliti untuk mengambil judul penelitian: "Analisis Dampak Program Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Taliabu

1.1. Masalah Penelitian

Menurut Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan (*CRI Index*) tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 90 dari 157 negara serta menempati peringkat 98 dari 157 negara terkait belanja sosial pemerintah. Terlebih lagi, 24 persen penduduk Indonesia hidup di antara garis kemiskinan dan 1,5 kali garis kemiskinan masih sangat rentan untuk kembali jatuh miskin jika mereka mengalami guncangan, seperti terkena penyakit, bencana alam, atau gangguan lainnya terhadap pendapatan dan mata pencaharian sehari-hari mereka (World Bank, 2017)

Dimulai dengan Program Progres di Mexico pada 1998, program bantuan tunai saat ini telah menjadi program penanggulangan kemiskinan yang populer di dunia. Hal ini dikarenakan beberapa studi menemukan bahwa program bantuan tunai berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan capaian pendidikan, dan memperbaiki status kesehatan penduduk miskin (Lora, Powell, van Praag, & Sanguinetti, 2010); (Grimmie, 2013); (Skoufias & Di Maro, 2008); (Vere, 2011). Tetapi menerima bantuan tunai dapat mengubah perilaku penerima secara negatif, seperti lebih berani mengambil risiko, mengurangi kepesertaan asuransi, mengurangi partisipasi di pasar kerja, dll (Dabalén, Kilic, & Wane, 2008). Akan tetapi beberapa studi lain tidak menemukan dampak negatif bantuan tunai terhadap perilaku penerima (Barker, Filmer, & Rigolini, 2014); (Dwiputri, 2017).

Atas temuan yang berbeda diatas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lanjutan khususnya di Kabupaten Taliabu, sehingga yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak program keluarga harapan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Taliabu selama tahun 2015-2021.?

2. Bagaimana dampak program bantuan tunai terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Taliabu selama tahun 2015-2021.?
3. Bagaimana dampak program bantuan tunai Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Taliabu selama tahun 2015-2021.?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi (Kuswanto & Dewi, 2016); (Sari, Anwar, & Darussamin, 2016). Kemiskinan memiliki konsep yang sangat beragam (Efendi, Indartono, & Sukidjo, 2019); (Nainggolan & Susantyo, 2017). Banyak definisi kemiskinan yang mengemuka dalam diskusi-diskusi. Definisi tersebut kemudian digunakan sebagai standar untuk mengukur kemiskinan dan aksi penanganannya. Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah (Susanti, 2013)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan seperti padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain (BPS, 2020). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi untuk wilayah perkotaan, dan 47 jenis komoditi untuk wilayah pedesaan (BPS, 2020)

Latar belakang belakang komunitas masyarakat dengan berbagai kultur, juga akan mempengaruhi kemiskinan. Kearifan lokal diperlukan sebagai alat pengentasan kemiskinan, mengingat kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak bisa di atasi melalui pendekatan ekonomi belaka, tetapi harus terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam suatu komunitas. Masalah multidimensional membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, komunitas dan kearifan lokal itu sendiri (Possumah, Muhammad, Padli, Talib, & Shah, 2018). Beberapa teori di atas, dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan segala bentuk keterbatasan ekonomi baik bahan makan maupun material, politik, sosial budaya, partisipasi dan distribusi anggaran pemerintah, pemerintah yang buruk, korupsi, sumber daya terbatas, infrastruktur terbatas, lapangan kerja, pendidikan dan ketrampilan. Kemiskinan ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah dalam menetapkan kebijakannya. Otoritas otoritas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat mendorong penargetan kebijakan atau program agar lebih tepat sasaran karena sangat diperlukan untuk pengurangan kemiskinan (Guritno, Samudro, & Soesilo, 2018). Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural (Sari et al., 2016).

Kemiskinan bisa disebabkan karena faktor natural, kultural dan struktural. Tiga penyebab kemiskinan ini memiliki cara penanggulangan yang berbeda-beda. Intervensi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan hendaknya mengkaji penyebab kemiskinan tersebut. Harapan yang diinginkan agar penanggulangan kemiskinan bisa efektif dan efisien, guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.

2.1.2. PKH (Program Keluarga Harapan)

Program pengentasan kemiskinan telah membantu masyarakat miskin, namun belum mampu mengatasi persoalan non pendapatan (Hadna & Kartika, 2017). Di Indonesia mengatasi persoalan penanggulangan kemiskinan yang diarahkan untuk mengatasi

persoalan non pendapatan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, diarahkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Kemensos RI, 2018 : 9 dalam (Beni & Manggu, 2020).

Desain PKH ini bertujuan meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia untuk generasi yang akan datang. Program ini menempatkan perempuan pada posisi yang unik sebagai penerima bantuan. Para perempuan penerima bantuan harus mampu mengatur dan mengelola uang bantuan yang diterima sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh pendamping program dimana uang tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya (Suntiana, Kanto, & Soenyono, 2015). Program ini memberikan bantuan keuangan kepada orang miskin, agar dapat mengakses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

2.1.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai

BPNT merupakan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbentuk bantuan sosial non tunai. Awalnya bantuan ini bernama Raskin yang kemudian berganti nama Rastra. Program Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) diperuntukkan kepada rumah tangga miskin yang terbebani dalam hal membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan. Sebagai program nasional, Raskin yang dimulai sejak 1998 telah mengalami perubahan dan perbaikan konsep dan proses implementasi program dengan tujuan akhirnya adalah pengentasan kemiskinan (Rahayu, Waimbo, & Kabiay, 2019)

BPNT merupakan program tindak lanjut dari Rastra (beras sejahtera). BPN ini didistribusikan kepada warga miskin dalam bentuk kupon elektronik (*e-voucher*). Tujuan *e-voucher* ini untuk menjamin 6T : Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi. *E-voucher* ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bernutrisi, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian tujuan BPNT adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019 : 3 dalam (Karunia & Ibrahim, 2021)).

Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di *e-Warong*. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur dengan kebijakan pemerintah. (Kemensos, 2020 dalam (Hidayat, 2021)).

2.1.4. Strategi dan Kebijakan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan

Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran,

pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

(Paradita, 2021), menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

1. Masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan.
2. Selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menysasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga.
3. Perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai.

Sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19.

Gambar 2.1.
Strategi dan Kebijakan Percepatan
Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpanga



Sumber: RPJMN 2015-2019

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Minas, Jakobsen, Kauppinen, Korpi, & Lorentzen, 2018), mengatakan bahwa manfaat bantuan sosial adalah pilihan terakhir dalam sistem perlindungan sosial nasional, dan reformasi desentralisasi yang mengarah pada peningkatan kearifan lokal atas implementasi undang-undang nasional. Hal ini merupakan tren internasional yang sering disebut sebagai devolusi. Reformasi hendaknya mengarahkan resentralisasi yang melibatkan kerja sama antar kelembagaan, antara lembaga-lembaga kesejahteraan yang berada pada tingkat hierarki masing-masing.

(Minas et al., 2018) dalam penelitiannya di Swedia, Norwegia, Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan hasil yang berbeda, dimana model bantuan sosial dengan cara sentralistik seperti dilakukan oleh Swedia dan Norwegia kurang memiliki dampak. Sedangkan bantuan sosial yang diserahkan kepada pemerintah negara bagian seperti dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat telah menghasilkan hal yang berbeda seperti ketika dilakukan pada tingkat sentral. Pelimpahan kewenangan dari pusat kepada negara bagian berupa pemindahan keuangan dari pusat kepada negara bagian (Minas et al., 2018)

Hasil penelitian Kheimili dan Belloumi menyimpulkan bahwa jaminan sosial di Metlaoui, Tunisia dapat membantu pengeluaran bidang kesehatan dan pendidikan keluarga miskin. Khemili dan Belloumi dalam melakukan penelitian menggunakan data survei yang dikumpulkan antara Juli 2012 dan Januari 2014, yang mencakup 200 rumah tangga miskin. Hasil kuesioner yang dikumpulkan memberikan analisis tentang reaksi, perilaku dan strategi yang diadopsi oleh rumah tangga miskin sebagai hasil dari berbagai bentuk risiko. Jaminan sosial berdampak pada sejumlah bidang yang berbeda, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pendapatan.

Penelitian tersebut mengeksplorasi pembagian risiko secara lengkap dan sebagian, untuk menyelidiki dampak skema jaminan sosial pada strategi yang di adopsi oleh rumah tangga untuk mengatasi guncangan ekonomi. Hasil estimasi model yang berbeda menunjukkan bahwa jaminan sosial dapat membantu rumah tangga yang dilindungi, dengan memilih strategi yang lebih murah untuk mengatasi risiko. Namun, peran jaminan sosial tetap tidak memadai, mengingat bahwa rumah tangga tertutup kurang memiliki kepercayaan terhadap layanannya dan mereka mengadopsi strategi asuransi diri atau perataan pendapatan. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa jaminan sosial memainkan peran penting di Metlaoui, tetapi tetap tidak mencukupi, terutama untuk rumah tangga yang tidak tercakup oleh jaminan sosial dan menderita dari pengeluaran kesehatan yang besar (Khemili & Belloumi, 2018).

Berdasarkan penelitian di atas, jaminan sosial yang diberikan belum bisa mengadopsi semua kebutuhan kesehatan dan pendidikan rumah tangga miskin, sehingga masyarakat miskin masih menderita akibat pengeluaran kesehatan yang sangat tinggi. Selain itu, masyarakat juga kurang memiliki kepercayaan penuh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, apabila menggunakan jaminan sosial yang diterimanya.

Hasil penelitian (Sinnathurai & Březinová, 2012) dalam , menganalisis faktor penentu kemiskinan secara signifikan dari sektor perkebunan, mengingat banyaknya kemiskinan akibat pengangguran kronis. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemerintah Sri Lanka dalam menekan kemiskinan dan kesejahteraan sosial telah menghabiskan uang dalam jumlah besar. Namun, kemiskinan yang ada di Sri Lanka masih tinggi terutama di wilayah Kawasan perkebunan dan dan wilayah perdesaan.

Vijayakumar dalam analisisnya, melihat kemiskinan dengan menggunakan data nasional dan regional hasil survey yang menghasilkan data sosial ekonomi di Provinsi terpilih dengan 89 Sekretariat Divisional dari provinsi Subaragamuva, Central dan Uva. Analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan jelas menunjukkan bahwa, variabel seperti lapangan kerja industri, pendidikan, akses ke pasar dan infrastruktur secara signifikan dan berpengaruh negatif terhadap dampak kemiskinan sektor perkebunan. Begitu juga, pekerjaan pertanian memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan adalah pengambilah kebijakan peningkatan

ketersediaan infrastruktur regional, infrastruktur pasar, dan pendidikan (Sinnathurai & Březinová, 2012) .

Selanjutnya, (Iryanti, 2016) mengatakan penanggulangan kemiskinan sebagai tantangan dan strategi Islam menghasilkan penelitian bahwa kurangnya kepedulian sosial sebagai kolektif. Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks. Kemiskinan ada dan sudah ada di semua level masyarakat dan masyarakat dunia dalam sejarah perjalanan manusia telah dicatat, terlepas dari sumber daya rendah, tahap perkembangan, tingkat teknologi, struktur sosial atau budaya. Namun, pendekatan kemasyarakatan terhadap pengentasan kemiskinan bervariasi secara signifikan dari ketidakpedulian terhadap intervensi aktif, dari ketergantungan pada strategi pribadi atau kolektif, dan antara strategi distribusi dan pertumbuhan, tergantung pada kemandirian lembaga sosio-ekonomi yang ada dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Sirageldin, 2000).

Menurut (Sirageldin, 2000), sepanjang sejarah, nilai-nilai individu dan sosial, terutama dimana kesetaraan ideologi menempati peringkat tinggi, telah menjadi penentu penting bagaimana individu dan masyarakat memandang kemiskinan sebagai masalah yang membutuhkan perhatian di tingkat masyarakat. Dalam kasus Islam sebagai sistem etika, adalah sebuah premis yang diterima bahwa keputusan kebijakan dalam masyarakat Islam harus melewati filter moral Islam. Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks sebagai akibat dari kurangnya pertumbuhan dan ketidaksetaraan. Kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman teknis dan empiris tentang kemiskinan dikombinasikan dengan institusi yang efisien dan sistem nilai sosial yang mendukung.

Lebih lanjut (Sirageldin, 2000), mengatakan dasar dari sistem etika Islam dan memperlakukan etos Islam sebagai ideal, dimana kebijakan sosial-ekonomi menangani kemiskinan eliminasi dinilai. Islam memandang masyarakat sebagai satu kesatuan dimana kebebasan individu dan martabat manusia adalah yang tertinggi meskipun tunduk pada aksioma tanggung jawab. Etika ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak boleh menghadirkan 'Ketergantungan'. Kebijakan seharusnya tidak mengarah pada pelembagaan kemiskinan. Kebijakan berdasarkan transfer yang tidak mengangkat orang miskin dari status ketergantungan mereka tidak boleh ditetapkan, kecuali dalam kasus-kasus seperti itu bencana. Berdasarkan bukti konseptual dan empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika Islam mendukung strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan pada prinsip mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapatkan kesimpulan bahwa dalam proses penanggulangan kemiskinan, harus diperhatikan dengan secermat-cermatnya ketika merumuskan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan, jangan sampai kebijakan penanggulangan kemiskinan justru menghadirkan ketergantungan orang miskin, yang tidak memiliki etos kerja. Selain itu kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan kemiskinan baru. Penambahan bantuan sosial yang terus dilakukan pemerintah, jangan menimbulkan dorongan masyarakat untuk tetap memiskinkan diri. Evaluasi menjadi penting dan perlu dilakukan, setelah sekian puluh tahun masyarakat miskin mendapatkan bantuan. Seberapa besar keberhasilan bantuan sosial tersebut, dalam menurunkan kemiskinan.

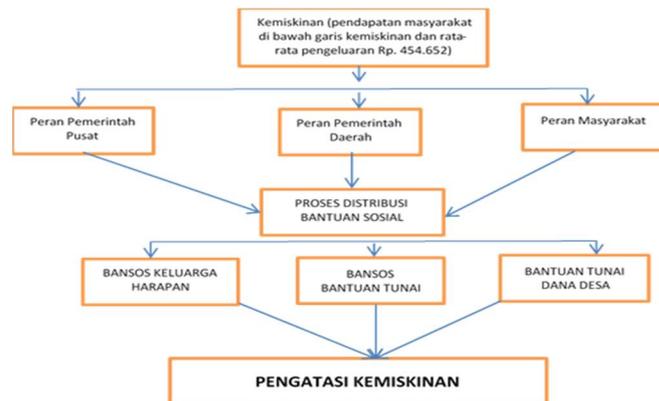
2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Kabupaten Taliabu untuk mencari kebijakan yang paling efektif dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemilahan wilayah dalam penentuan obyek penelitian, agar dapat diketahui kebijakan yang efektif pada setiap wilayah, mengingat setiap wilayah memiliki kultur yang

berbeda-beda. Orientasi penelitian-penelitian terdahulu dalam penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia.

Berkaitan dengan hal ini teori yang ingin dibangun dalam penelitian ini adalah penanggulangan kemiskinan yang efektif di masing-masing kabupaten/kota. Bentuk bantuan yang diseragamkan di seluruh Indonesia tanpa melihat latar belakang, kultur, dan kondisi setiap wilayah apakah juga akan menghasilkan penurunan kemiskinan yang seragam. Penyeragaman bentuk dan jenis bantuan secara nasional, akan memiliki dampak yang tepat atau justru tidak berdampak dalam penanggulangan kemiskinan. Apabila penyeragaman tidak efektif, maka diperlukan alternative kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga terjadi perbedaan bentuk dan jenis kebijakan. Aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat miskin itu sendiri.

Penulis akan melihat peran itu, dengan menggunakan variabel bantuan sosial (Peran masing-masing dalam penanggulangan kemiskinan yang diwakili oleh variabel-variabel di atas, merupakan implementasi kebijakan. Kerangka konsep penelitian dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.2.
Kerangka Konsep Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

1. Diduga program keluarga harapan berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Taliabu selama tahun 2015-2021.
2. Diduga program bantuan tunai berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Taliabu selama tahun 2015-2021.
3. Diduga program bantuan tunai Dana Desa berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Taliabu selama tahun 2015-2021.

DATA DAN METODOLOGI

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. Sumber data sekunder diusahakan perolehannya pada instansi yang menjadi sumber data yaitu Dinas Sosial Kabupaten Taliabu, Bappeda, dan BPS.

Untuk menganalisis Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Taliabu digunakan alat uji berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi dan pengujian hipotesis. Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji koefisien determinasi dibantu dengan program *SPSS* versi 22 for windows, sedangkan untuk analisis regresi dan pengujian hipotesis dengan melihat *p-value* menggunakan aplikasi *Data Analysis* pada program *Microsoft Excel*

HASIL

4.4 Analisis Data Statistik

Hasil Estimasi menunjukkan bahwa program keluarga harapan, bantuan sosial dan bantuan dana desa mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Dapat dilihat pada tabel uji regresi yang menunjukkan pengaruh program keluarga harapan, bantuan sosial dan bantuan dana desa mempengaruhi tingkat kemiskinan sebagai berikut.

Tabel 4.8. Uji Regresi Variabel

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,865	,767		10,249	,002
PKH	,003	,010	,186	,269	,805
BANSOS	,559	,584	5,339	,958	,409
DANA.DESA	-.538	,588	-4,960	-.915	,428

a. Dependent Variable: JUMLAH.PENDUDUK.MISKIN

Hasil pengaruh variabel program keluarga harapan menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar 0.003 terhadap variabel kemiskinan. Hal tersebut berdampak positif terhadap kemiskinan karena jika terjadi kenaikan 1 persen pada bantuan sosial dan bantuan dana desa, maka akan menurunkan Persentase Kemiskinan sebesar 0.3 persen di Kabupaten Pulau Taliabu. Probabilitas t-statistik $0.269 > 0.05$ yang menandakan bahwa variabel ini signifikan mempengaruhi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Sehingga berarti hipotesis satu (H_1) ditolak dan H_a dapat diterima. Hal ini berarti hipotesis pertama (H_a) pelaksanaan program keluarga harapan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kemudian hasil pengujian variabel bantuan sosial dapat dilihat nilai koefisien variabel bantuan sosial sebesar 0.559 berpengaruh positif dan signifikan dengan Probabilitas t-statistik $0.958 > 0.05$, yang menandakan bahwa variabel ini signifikan mempengaruhi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Sehingga berarti hipotesis satu (H_1) ditolak dan H_a dapat diterima. Hal ini berarti hipotesis kedua (H_a) pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Selanjutnya hasil pengujian variabel bantuan dana desa dapat dilihat nilai koefisien variabel bantuan dana desa sebesar -0.538 berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan Probabilitas t-statistik $-0.915 > 0.05$, yang menandakan bahwa variabel ini tidak signifikan dan tidak dapat mempengaruhi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Sehingga hipotesis satu (H_1) diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H_a) pelaksanaan bantuan dana desa oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Penduduk miskin sangat mengandalkan dana bantuan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, disebabkan karena tingkat penghasilan mereka yang tergolong rendah, sehingga sebahagian dari masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain.

Meskipun perolehan dan bantuan dari pemerintah masih jauh dari keinginan masyarakat, namun tetap masyarakat selalu membutuhkan dana bantuan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga dana bantuan tersebut dijadikan sebagai dana bantuan alternatif bila mana pemerintah menyalurkan kepada masyarakat akan selalu dibutuhkan.

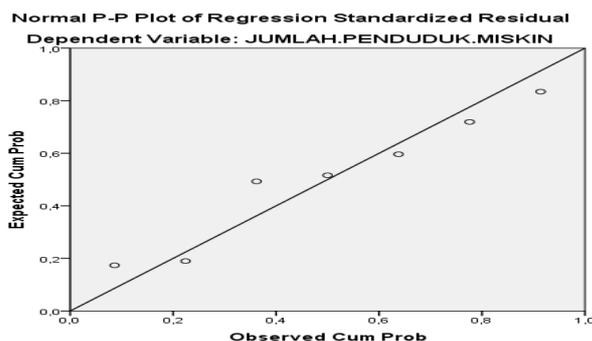
4.5 Pengujian Asumsi Klasik

Model regresi yang diperoleh diharapkan merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*best linear unbiased estimator* atau *BLUE*). Kondisi ini dipenuhi bila memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Model data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder yang dikumpulkan dari tahun 2015 sampai 2021 kemudian ditentukan dengan metode simple random sampling pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Secara deskriptif statistik menunjukkan bahwa rata-rata masing variabel menunjukkan bahwa rata-rata program keluarga harapan terhadap garis kemiskinan adalah Rp.764.960 dengan rata-rata jumlah bantuan program keluarga harapan yang diterima sebesar Rp.616.345 rupiah per bulan, dan rata-rata jumlah bantuan perkapita yang diterima Rp.48.832.658 rupiah per kecamatan.

4.6.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga berguna untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik atau belum. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Di bawah ini adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan kurva Normal P-P Plot.

Gambar 4.2



Kurva dikatakan berdistribusi normal jika data menyebar disekitar garis diagram dan mengikuti model regresi. Begitu juga sebaliknya, bila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji Normalitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *rasio skewness* dan *rasio kuortis*. Sebagai pedoman bila rasio kuortis dan skewness bernilai antara -2 hingga +2, maka distribusi data adalah normal (Ghozali, 2011). Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal, sehingga uji asumsi klasik terpenuhi.

4.6.2. Uji Multikolinieritas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor (VIF)*. Berikut ini adalah tabel yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan program statistik *SPSS versi. 20* (Ghozali, 2011: 95-96). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,865	,767			10,249	,002		
PKH	,003	,010	,186	,269	,805	,360	,360	2,776
BANSOS	,559	,584	5,339	,958	,409	,006	,006	179,435
DANA_DESA	-,538	,588	-4,960	-,915	,428	,006	,006	169,770

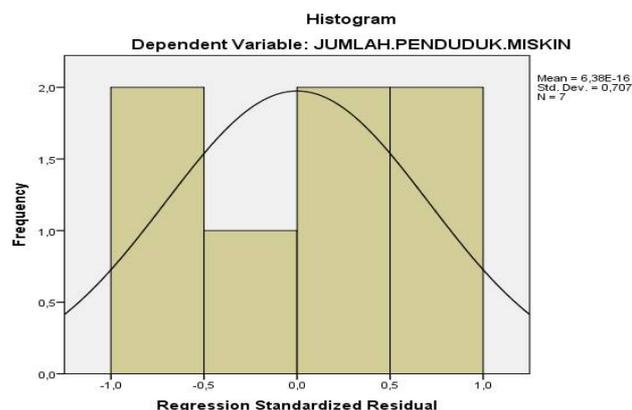
a. Dependent Variable: JUMLAH.PENDUDUK.MISKIN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan sebagai prediktor model regresi, yakni: program keluarga harapan memiliki nilai VIF ($2,776 < 10$) dan nilai tolerance ($0,360 > 0,1$), bantuan sosial memiliki nilai VIF ($179,435 < 10$) dan nilai tolerance ($0,06 > 0,1$) dan dana desa memiliki nilai VIF ($169,770 < 10$) dan nilai tolerance ($0,06 > 0,1$). Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, dengan arti lain bahwa semua variabel tersebut dapat digunakan sebagai variabel yang saling berhubungan.

4.6.3. Uji Heteroskedastisitas.

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (Z_{pred}) dengan residualnya (S_{resid}). Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang tidak teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3



Dari grafik *standar residual* diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas pada titik-titik data dan cenderung tersebar mengumpul pada nilai di atas -2 hingga nilai 2 di bawah diantara nilai 0 (nol) pada sumbu y, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model diatas.

4.6.4. Uji Koefisien Determinasi R-Square

Pengujian hasil korelasi antar nilai variabel dengan nilai variabel yang sama, artinya munculnya suatu data dipengaruhi oleh satu atau lebih data sebelumnya. Uji *R-square* berakibat pada suatu model regresi ialah varian sampel tidak dapat menggambarkan/mewakili varian populasinya. Untuk mengetahui ada tidaknya pada autokorelasi dapat dilihat melalui uji Durbin Watson melalui uji regresi. Jika $d_u < d_4 - d_u$ dikatakan tidak ada Autokorelasi, Suharjo (2013: 115).

Tabel 4.10
Uji Model Summary

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,694 ^a	,481	-,038	,80685	,950

a. Predictors: (Constant), DANA.DESA, PKH, BANSOS

b. Dependent Variable: JUMLAH.PENDUDUK.MISKIN

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan bahwa nilai *R-square* adalah 0,481 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model variabel program keluarga harapan, bantuan sosial dan bantuan dana desa mampu menjelaskan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan sebesar 48.1% sedangkan sisanya sebesar 51.9% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dalam penelitian ini.

4.6 . Uji Koefisien Regresi

Berdasarkan pengujian analisis dibawah ini maka persamaan regresi disusun meliputi variabel dependen Kemiskinan (Y) dan variabel independen Program Keluarga Harapan (X1), variabel Bantuan Sosial (X2) dan Variabel bantuan Dana Desa (X3), maka diperoleh persamaan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 7.865 + 0.003 (X_1) + 0.559 (X_2) + -0.538 (X_3) + e$$

Rekapitulasi hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 4.11, sebagai berikut:

Tabel 4.11
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Variabel

Variabel	Koefisien Regresi (Unstandardized)	Koefisien Regresi (Standardized)	T Hitung	Sig
(Contant)	7,865		10,249	,002
PKH	,003	,186	,269	,805
BANSOS	,559	5,339	,958	,409
DANA.DESA	-,538	-4,960	-,915	,428
Adjusted R Square	0.694	F Hitung = 0.927		
R Square (R ²)	0.481	Sig. = 0.524		
Multiple R	-0.038			

Sumber: Data peneliti diolah 2022

4.7.1. Uji Regresi Parsial (Uji-t)

Dalam pengujian koefisien regresi secara parsial merupakan pengujian terhadap hubungan diantara variabel penelitian secara terpisah. Pengaruh variabel-variabel independen secara parsial ditunjukkan oleh besarnya masing-masing nilai t- statistik.

Kemudian, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan (Y) dan variabel independen Program Keluarga Harapan (X1), variabel Bantuan Sosial (X2) dan Variabel bantuan Dana Desa (X3). Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai t-statistik sebesar 10.249 dengan probablity sebesar 0.02 dengan $\alpha = 0.05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut yaitu program keluarga harapan, bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Sementara variabel bantuan dana desa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan dilihat dari koefisien regresi -0.538, dengan t hitung -0.915, Artinya bahwa jika bantuan dana desa berkurang, maka menambah angka kemiskinan di tiap-tiap kecamatan, sebaliknya jika bantuan dana desa bertambah, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu.

4.7.2. Uji Regresi Simultan (Uji-f)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel atau untuk mengetahui pengaruh Variabel Kemiskinan (Y) dan variabel independen Program Keluarga Harapan (X1), variabel Bantuan Sosial (X2) dan Variabel bantuan Dana Desa (X3). Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan menggunakan uji F, yaitu dengan cara membandingkan hasil nilai F-hitung dengan alpha (α).

Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf nyata $\alpha = 0.05$ maka dinyatakan signifikan dan sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf nyata ($\alpha = 0.05$) maka dinyatakan tidak signifikan dalam pribadi, (2003). Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Rangkuman Hasil Analisis Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,811	3	,604	,927	,524 ^b
	Residual	1,953	3	,651		
	Total	3,764	6			

a. Dependent Variable: JUMLAH.PENDUDUK.MISKIN
b. Predictors: (Constant), DANA.DESA, PKH, BANSOS

Berdasarkan dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda pada tabel 4.12 di atas diketahui nilai F_{hitung} variabel program keluarga harapan, bantuan sosial dan bantuan dana desa terhadap tingkat kemiskinan adalah 0.927. dengan tingkat signifikan $\alpha = 0.05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

PEMBAHASAN

4.8.1. Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian ditatas dapat diketahuai bahwa pengaruh program keluarga harapan secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah untuk keluarga pra sejahtera. Tujuan program keluarga harapan adalah memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi dan gizi, serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, disabilitas berat, dan orang lanjut usia. Selain itu juga untuk meningkatkan kebutuhan dan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga sejahtera agar mumpuni untuk mendidik serta melakukan perubahan perilaku negatif keluarga miskin agar setiap Bansos yang diterima bisa dikelola sebaik mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian yang dilakukan (Risqiana, 2019). Dampak Program Keluarga Harapan (pkh) Terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (studi kasus di Kecamatan Wonopringgo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk-bentuk bantuan PKH yakni bantuan uang tunai PKH dan bantuan komplementaritas seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, bantuan pangan non tunai, beras sejahtera serta bantuan-bantuan lainnya baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (2) peran pendamping PKH yakni mendampingi peserta PKH dalam berbagai komitmen PKH seperti verifikasi pendidikan dan kesehatan, validasi calon peserta PKH, pemutakhiran data serta kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. (3) dampak PKH terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wonopringgo yakni, di satu sisi bisa menyadarkan masyarakat untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada pemerintah, sadar pendidikan dan kesehatan serta peduli terhadap lingkungan. Namun, di sisi lain masih ada masyarakat yang bermental miskin dan merasa perlu dibantu oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya padahal kondisi secara fisik dianggap mampu oleh lingkungan sekitarnya. PKH diimplementasikan secara baik karena memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tetapi, di Kecamatan Wonopringgo pengentasan kemiskinan dengan kategori mandiri atau mampu sulit dilakukan karena tidak adanya koordinasi antara pendamping dan pemerintah setempat karena kurangnya sosialisasi PKH secara umum. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar sektor pemerintah untuk bisa mewujudkan pengentasan kemiskinan di negara ini.

Penelitian yang dilakukan (Asnawi, Kindangen, & Engka, 2021). Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif antara pendidikan kepala keluarga, bantuan sosial PKH dan RTLH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengaruh tingkat pendidikan kepala keluarga

lebih besar dibandingkan dengan bantuan PKH dan RTLH dalam upaya pengentasan kemiskinan. Variasi perubahan penurunan kemiskinan 51,22% disebabkan oleh variasi perubahan tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah bantuan sosial (PKH dan RTLH) yang diterima rumahtangga di Kabupaten Minahasa Tenggara.

4.8.2. Pengaruh Program Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui dalam pelaksanaan program bantuan sosial memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari adanya program Bantuan Sosial pemerintah yaitu lebih bermanfaat karena masyarakat penerima bantuan dana tersebut dapat mengelola sendiri uang bantuan yang diperoleh. Hasil estimasi dapat dilihat nilai koefisien variabel bantuan sosial sebesar 0.559 berpengaruh positif dan signifikan dengan probabilitas t-statistik $0.958 > 0.05$, artinya apabila bantuan sosial meningkat, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, karena bantuan dana sosial dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga maupun kebutuhan penunjang usaha bagi masyarakat Kabupaten/Kecamatan Pulau Taliabu.

Sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan (Dewi & Andrianus, 2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015. Hasil penelitian dengan program bantuan langsung tunai, bagaimana kebijakan bantuan tersebut dilaksanakan, apakah berdampak pada kemiskinan dan bagaimana evaluasi program bantuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik periode 2005-2015 dengan menggunakan analisis dan korelasi kualitatif. Studi ini menemukan bahwa program bantuan tunai langsung berdampak pada kemiskinan di Indonesia, namun kebijakan program tersebut menuai protes karena penyaluran dan pencairannya dinilai membingungkan. Di sisi lain, program ini dinilai lebih efektif dan efisien untuk diberikan kepada masyarakat daripada bantuan sosial berupa sembako, karena masyarakat dapat mengeluarkan dana untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pangan.

Penelitian yang dilakukan (Norman, 2020). Pengaruh bantuan sosial terhadap partisipasi Pendidikan dan kesehatan pada program Keluarga harapan (PKH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pengaruh bantuan uang tunai terhadap partisipasi pendidikan KPM PKH adalah 77,5% dan kekuatan pengaruh jasa pendampingan sosial terhadap partisipasi pendidikan adalah 68,7%. Adapun kekuatan pengaruh bantuan uang tunai terhadap kesehatan KPM PKH adalah 61,5% dan signifikansi pengaruh jasa pendampingan terhadap kesehatan KPM PKH adalah 71,9%. Dengan demikian, kondisi pasca bencana gempa bumi tersebut tidak memiliki pengaruh negatif pada bantuan sosial (variabel terikat) terhadap partisipasi pendidikan dan kesehatan KPM PKH (variabel bebas).

4.8.3. Pengaruh Program Bantuan Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian estimasi bantuan dana desa terhadap kemiskinan dapat diketahui bahwa, nilai koefisien variabel bantuan dana desa sebesar -0.538 berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan Probabilitas t-statistik $-0.915 > 0.05$, yang menandakan bahwa variabel ini tidak signifikan dan tidak dapat mempengaruhi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Sehingga hipotesis satu (H_1) diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H_a) pelaksanaan bantuan dana desa oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan yang dilakukan (Maun, 2020). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat Miskin terkena dampak covid-19 di desa talaitad kecamatan suluun Tareran kabupaten minahasa selatan. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic *Covid-19* adalah faktor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya

diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan (Agustin, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar sudah berjalan dengan cukup baik hal tersebut ditandai dengan mayoritas penerima dana adalah keluarga/rumah tangga miskin, Sistem penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dan dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program di Kecamatan Makassar tergolong rendah. Namun selain itu masih ditemukan pula kelemahan dan kekurangan dari program ini, misalnya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan program BLT kepada masyarakat sangat terbatas dan tidak adanya pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan mengenai program tersebut. Adapun Faktor-faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat, struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain tidak tersedianya pedoman umum program serta petunjuk pelaksana setiap tahapan pelaksanaan, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk mengetahui pengaruh variabel program keluarga harapan, bantuan sosial dan bantuan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu, maka dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan dapat mensejahterakan masyarakat, keluarga untuk kebutuhan rumah tangga miskin ditiap-tiap kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu dari hasil perhitungan koefisien korelasi variabel program keluarga harapan (X1) yaitu sebesar 0.554 dengan nilai signifikan 0.805 pada uji estimasi t-hitung 0.269, dapat diartikan 26.9% pengaruh positif dan signifikan. Sementara sisanya 73.1% dipengaruhi oleh faktor lain yang termasuk dalam penelitian ini.
2. Bantuan Sosial Tunai, untuk kebutuhan rumah tangga miskin alokasi penggunaan paling banyak dalam pemenuhan kebutuhan dasar ditiap-tiap kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu dari hasil perhitungan koefisien korelasi variabel bantuan sosial tunai (X2) yaitu sebesar 0.209 dengan nilai signifikan 0.409 pada uji estimasi t-hitung 0.958, dapat diartikan 95.8% pengaruh positif dan signifikan yaitu lebih dari setengah dana di alokasikan kepada bantuan sosial.
3. Bantuan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan, dari hasil perhitungan koefisien korelasi variabel (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan, dapat dilihat hasil uji yaitu sebesar 0.246 dengan nilai negatif tidak signifikan -0.428 pada uji estimasi t-hitung -0.915, dapat diartikan 91.5% tidak berpengaruh positif dan signifikan, artinya tidak semuanya keluarga miskin memperoleh bantuan dana desa secara keseluruhan, masih ada masyarakat atau keluarga yang ingin diberikan bantuan, namun tidak tepat sasaran serta sulit untuk menginformasikan mana yang layak dan tidak untuk memperoleh bantuan dana desa. Dampak negatif ini bisa di atasi jika dari pemerintah kecamatan sampai ketingkat desa mampu berkoordinasi dengan baik dan transparansi agar tujuan dari program bantuan dana desa ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. D. (2007). *ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)(Studi Kasus di Kecamatan Makassar Kota Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Asnawi, R., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan Dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(2), 109–126.
- Barker, M., Filmer, D., & Rigolini, J. (2014). Evaluating Food versus Cash Assistance in Rural Cambodia. *World Bank. Washington, DC*.
- Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 162–170.
- BPS, B. P. S. J. (2020). Kemiskinan dan Ketimpangan. URL: <https://www.bps.go.id/Subject/23/Kemiskinan-Dan-Ketimpangan>. *Html*.(Diakses Tanggal 5 Maret 2021).
- Dabalén, A., Kilic, T., & Wane, W. (2008). Social Transfers, labor supply and poverty reduction. *World Bank Institute Working Paper*, 4783.
- Devarajan, S., & Reinikka, R. (2004). Making services work for poor people. *Journal of African Economies*, 13(suppl_1), i142–i166.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Dwiputri, I. N. (2017). The impact of the unconditional cash transfer program (BLT) on cigarette consumption in Indonesian society. *Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB.*, 32(2), 138–150.
- Efendi, R., Indartono, S., & Sukidjo, S. (2019). The Relationship of Indonesia's Poverty Rate Based on Economic Growth, Health, and Education. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 323–330.
- Grimmie, C. (2013). Masalah Kemiskinan Dunia. *Diakses Dari Http://Thethirdteamofsociology.blogspot.com/2012/09/Masalah-Kemiski-Nan-Dunia.html Pada*, 6.
- Gupta, M. S., & Abed, M. G. T. (2002). *Governance, corruption, and economic performance*. International Monetary Fund.
- Guritno, D. C., Samudro, B. R., & Soesilo, A. M. (2018). Does Political Dynasty Cause Poverty? *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 11(2), 429–446.
- Habibov, N., & Fan, L. (2006). Social assistance and the challenges of poverty and inequality in Azerbaijan, a low-income country in transition. *J. Soc. & Soc. Welfare*, 33, 203.
- Hadna, A. H., & Kartika, D. (2017). Evaluation of poverty alleviation policy: Can conditional cash transfers improve the academic performance of poor students in Indonesia? *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1295548.

- Hidayat, A. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*.
- Iryanti, R. (2016). *Strategi Nasional Dalam Pencapaian Target Pengurangan Kemiskinan Tahun 2019*. Indonesia: Jakarta.
- Karunia, R. L., & Ibrahim, M. M. (2021). PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET TETAP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 3(2).
- Khemili, H., & Belloumi, M. (2018). *Social Security and Fighting Poverty in Tunisia. Economies*, 6 (1), 12.
- Kuswanto, K., & Dewi, I. G. P. (2016). Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1).
- Lora, E., Powell, A., van Praag, B. M. S., & Sanguinetti, P. (2010). *The quality of life in Latin American cities: Markets and perception*. World Bank Publications.
- Maun, C. E. F. (2020). efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Minas, R., Jakobsen, V., Kauppinen, T., Korpi, T., & Lorentzen, T. (2018). The governance of poverty: Welfare reform, activation policies, and social assistance benefits and caseloads in Nordic countries. *Journal of European Social Policy*, 28(5), 487–500.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2017). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 31–46.
- Norman, M. N. (2020). *ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)*. Universitas Hasanuddin.
- Paradita, A. (2021). *EFEKTIVITAS PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) TERHADAP RUMAH TANGGA MISKIN (RTM): Studi Kasus: Rumah Tangga Petani di Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan= THE EFFECTIVENESS OF WORKING PEOPLE'S POVERTY SURGERY PROGRAM (BEKERJA) ON POOR HOUSEHOLDS (RTM) Case Study; Farmer Household in Awo Village, Keera District, Wajo Regency, South Sulawesi Province*. Universitas Hasanuddin.
- Possumah, B. T., Muhammad, Z., Padli, J., Talib, J. A., & Shah, K. M. (2018). Local Knowledge, Public Policy and Poverty Reduction: A Review on Indonesia Experiences. *SHS Web of Conferences*, 45, 4002. EDP Sciences.

- Rahayu, Y. P., Waimbo, D. E., & Kabiay, M. (2019). Evaluasi kebijakan pro masyarakat miskin (studi kasus program raskin di Kabupaten Manokwari). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 121–146.
- Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? *Journal of Development Economics*, 86(1), 96–111.
- Risqiana, E. (2019). *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo)*. Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang.
- Sari, S. P., Anwar, D. D., & Darussamin, D. D. (2016). Analisis Pdrb, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(1), 86–101.
- Sinnathurai, V., & Březinová, O. (2012). Poverty incidence and its determinants in the estate sector of Sri Lanka. *Journal of Competitiveness*.
- Sirageldin, I. (2000). Elimination of poverty: Challenges and Islamic strategies. *Islamic Economic Studies*, 8(1).
- Skoufias, E., & Di Maro, V. (2008). Conditional cash transfers, adult work incentives, and poverty. *The Journal of Development Studies*, 44(7), 935–960.
- Suntiana, L., Kanto, S., & Soenyono, S. (2015). Rancangan model kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pemberdayaan perempuan (Kajian terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 18(3).
- Susanti, S. (2013). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. *Jurnal Matematika Integratif*, ISSN, 1412–6184.
- Tiongson, E. H., Davoodi, H. R., & Asawanuchit, S. S. (2003). *How Useful Are Benefit Incidence Analyses of Public Education and Health Spending*.
- Vere, J. P. (2011). Social Security and elderly labor supply: Evidence from the Health and Retirement Study. *Labour Economics*, 18(5), 676–686.
- World Bank, W. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. The World Bank.
- Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 tahun 2012, Bantuan Sosial (Bansos)

